



PAHMI 9th International Conference
Yogyakarta State University, 15 -16 September 2015

KEBIJAKAN KOTA KREATIF DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: SEBUAH ANALISIS KEBIJAKAN

Dyna Herlina Suwarto

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, UNY
dyna.herlina@gmail.com

Imam Karyadi Aryanto

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, DIY
(imam.karyadi@gmail.com)

OUTLINE

- Pendahuluan
- Tujuan Penelitian
- Metode Penelitian
- Landasan Teori
- **Hasil Penelitian**
- Kesimpulan dan Rekomendasi



PENDAHULUAN

- Industri kreatif di DIY memiliki 15 subsektor industri kreatif sesuai Inpres 6/ 2009 tentang Industri Kreatif : arsitektur; desain; fesyen (mode); film, video, dan fotografi; kerajinan; musik; pasar seni dan barang antik; penerbitan dan percetakan; periklanan; permainan interaktif; penelitian dan pengembangan; seni pertunjukan; teknologi informasi dan piranti lunak; televisi dan radio serta kuliner.
- Sektor ekonomi kreatif difasilitasi Pemerintah/ Negara melalui Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) sesuai Perpres No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif yang telah direvisi terakhir dengan Perpres No. 72/2015.
- Potensi DIY nilai ekonomi investasi industri kreatif yang mencapai Rp 534 miliar (Data Disperindagkop UKM DIY dalam Warta Ekonomi No 24/2012).
- Visi Daerah Istimewa Yogyakarta 2025: Pusat Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata di Asia Tenggara berhubungan dengan kebijakan industri kreatif dijabarkan dalam dokumen kebijakan pembangunan: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD; 20 tahunan), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD, 5 tahunan) dan RKPD (1 tahun)



INDUSTRI KREATIF/ BUDAYA KREATIF DI JOGJA



INDUSTRI KREATIF/ BUDAYA KREATIF DI JOGJA (2)



TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini ingin mengetahui kebijakan apa yang telah ditempuh Pemerintah Daerah DIY untuk memfasilitasi terbentuknya kluster industri kreatif dan kebijakan apa yang masih dibutuhkan oleh wirausaha industri kreatif di masa depan,

METODE PENELITIAN

- Pendekatan Kualitatif
- gabungan dari analisis isi kebijakan dan *focus group discussion*.
- Analisis isi digunakan untuk mengkaji isi atau substansi kebijakan.
- metode *focus group discussion* dipergunakan mengeskplorasi penilaian wirausaha usaha kreatif terhadap implementasi program pemerintah daerah dan usulan kebutuhan program yang dibutuhkan di masa depan.



LANDASAN TEORI (1)

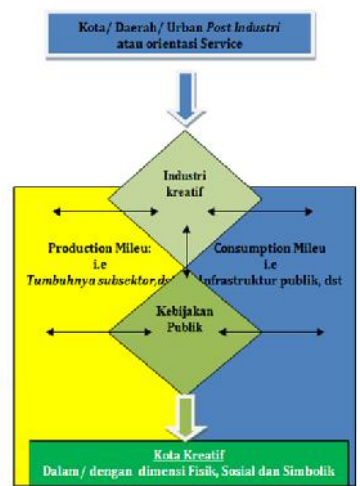
Kerangka Kerja Analitik Lingkungan Produksi Dan Konsumsi Kota Kreatif (creative production and consumption mileu)

Dimensi	Lingkungan Produksi (production mileu)	Lingkungan Konsumsi (consumption mileu)
Dimensi Fisik	Kualitas dan level harga tempat kerja; Ketersediaan layanan bisnis; Kehadiran industri berbasis pengetahuan; Infrastruktur riset dan pendidikan; Pemusatan/ konsentrasi bisnis (kluster kreatif).	Kualitas dan level harga perumahan/ permukiman; Ketersediaan fasilitas kenyamanan bagi rumah tangga (day care untuk anak-anak, sekolah, pertokoan, fasilitas olahraga, dsb).
	Keragaman dan kepadatan dari lingkungan yang telah dibangun; 'kualitas arsitektural'; Ketersediaan ruang kombinasi untuk hidup sekaligus bekerja; Ketersediaan fasilitas kenyamanan.	
Dimensi Sosial	Jaringan relasi (di dalam industri kreatif dan antara industri kreatif dengan sektor-sektor lain); Tempat untuk pertemuan forum kreatif ('tempat ketiga' (third places);	Keberagaman orang/ masyarakat; Keberagaman profesi/ pekerjaan.
	Keaktifan, 'kondisi kehidupan di jalanan' ('street life') Toleransi atas keberagaman kultural Toleransi atas keberagaman sosial	
Dimensi Simbolik	Warisan budaya otentik 'cerita/ kisah' atau 'DNA' dari area/ daerah Rasa komunitas (sense of community) Imaji kreatif/ imej kreatif	

Sumber: Trip dan Romein, 2010 (diolah).

LANDASAN TEORI (2)

Kerangka Penelitian



Kerangka Analisis Dokumen Kebijakan

Unit Kajian	Kategorisasi	Deskripsi
Ide/Gagasan	a. Industri Kreatif b. Kota Kreatif c. Kebijakan Kota Kreatif	Ide dan gagasan dalam RPJP dan RPJM tentang Industri kreatif, Kota kreatif dan kebijakan kota kreatif (kebijakan publik)
Perspektif Produksi	a. Fisik b. Sosial c. Simbolik	Bagaimana kebijakan industri kreatif dalam perspektif produksi RPJM dan RKPJ instansi terkait ?
Konsumsi Kreatif	a. Fisik b. Sosial c. Simbolik	Bagaimana kebijakan industri kreatif dalam perspektif ekonomi dalam RPJM, RKPJ terkait?

HASIL PENELITIAN (1)

Hasil Analisis Isi Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah DIY (1)

Dimensi	Lingkungan Produksi (production mileu)	Lingkungan Konsumsi (consumption mileu)
Dimensi Fisik	<ol style="list-style-type: none"> Potensi figur kreatif Institusi pendidikan dan lembaga riset Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Industri Kreatif menyasar IKM. 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Perumahan untuk menyediakan rumah layak huni dan diprioritaskan untuk warga berpenghasilan rendah beserta fasilitas pendukungnya. Penyediaan sekolah Pelestarian kawasan budaya beserta ruang seni budaya yang ada
	<ol style="list-style-type: none"> Ruang publik berbasis kawasan budaya dilestarikan untuk memberi ruang berkembangnya organisasi / komunitas kreatif dan daya tarik wisata Daya Tarik wisata dari kawasan budaya akan saling berdaya ungkit dengan industri kreatif. Insituti riset dan pendidikan tinggi sebagai wahana pengembangan SDM kreatif 	

HASIL PENELITIAN (2)

Hasil Analisis Isi Dokumen Kebijakan Pemerintah Daerah DIY (2)

Dimensi	Lingkungan Produksi (production mileu)	Lingkungan Konsumsi (consumption mileu)
Dimensi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> Institusi Pendidikan sebagai sarana pengembangan SDM kreatif masa depan Jaringan antara Pemerintah, dunia pendidikan tinggi, lembaga riset dan dunia usaha Third place (yang belum tercatat) 	<ol style="list-style-type: none"> Keberagaman struktur sosial masyarakat dari aspek identitas kultural, dan religi Keberagaman profesi yang didominasi non agraris.
	<ol style="list-style-type: none"> Institusi pendidikan melahirkan SDM kreatif dengan berbagai disiplin dan toleran dengan nilai-nilai lama dan baru yang tumbuh Kebijakan pemerintah bersinergi dengan stakeholder yang sensitif dengan kemajemukan kota Ruang publik urban/ sub urban (third place) sebagai ruang sosial untuk meredakan potensi konflik yang berangkat dari keberagaman 	
Dimensi Simbolik	<ol style="list-style-type: none"> Warisan budaya (cultural heritage) dan Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana <i>Among tani -dagang layar</i> <i>City of tolerance</i> 	

HASIL PENELITIAN (3)

Temuan berdasarkan *Focus Group Discussion* (1)

Dimensi	Lingkungan Produksi (production mileu)	Lingkungan Konsumsi (consumption mileu)
Dimensi Fisik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan tempat kerja: optimalisasi kluster dan pasar yang telah ada, pendirian kluster-kluster dan co-working space baru 2. Keterkaitan riset dan produksi: perlu optimalisasi Pemda DIY melalui Dewan Riset Daerah; 3. Layanan bisnis: dapat dioptimalkan melalui inkubator bisnis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kenyamanan tempat hidup dan kerja perlu diupayakan melalui fasilitas publik dan penguraian konsentrasi kepadatan dari urban ke kabupaten-kabupaten 2. Ketersediaan sekolah, pasar, fasilitas olahraga telah memadai, kenyamanan kota sebagai tempat tinggal dan kerja terancam karena pembangunan sentra bisnis seperti hotel dan mall yang masif dan terkonsentrasi di tengah kota 3. Perlu revitalisasi dan pelestarian ruang publik: Kawasan budaya dan ruang terbuka hijau
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi ruang publik berbasis kawasan budaya dan meningkatkan aksesibilitas pada ruang tersebut 2. Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang bebas diakses publik. 	

HASIL PENELITIAN (4)

Temuan berdasarkan *Focus Group Discussion* (2)

Dimensi	Lingkungan Produksi (production mileu)	Lingkungan Konsumsi (consumption mileu)
Dimensi Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat sistem aksesibilitas pada ruang publik sehingga dapat menciptakan atmosfer publik (public sphere). 2. Peningkatan jaringan kerja yang difasilitasi Pemda DIY. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberagaman struktur sosial masyarakat dan toleransi: 2. Keberagaman profesi dalam industri kreatif perlu ditoleransi.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi pendidikan telah melahirkan SDM kreatif dan perlu membangun keterbukaan terhadap industri kreatif 2. Kebijakan Pemda DIY perlu meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam hal sistem seleksi/kuratorial, pendampingan dan evaluasi 3. Ruang publik urban/ sub urban (third place) telah berfungsi sebagai ruang sosial untuk meredakan potensi konflik yang berangkat dari keberagaman 	
Dimensi Simbolik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warisan budaya (cultural heritage) dan Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana masih kuat berakar pada komunitas, masyarakat, kreator dan konsumen produk kreatif 2. <i>Among tani ke dagang layar</i>: transformasi profesi tanpa meninggalkan sektor basis. 3. <i>City of tolerance</i>: tingkat toleransi di Yogyakarta meski pasif masih dianggap paling tinggi dibandingkan daerah lain, bahkan di kota yang lebih besar daripada Yogyakarta 	

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pemda DIY telah memiliki arah kebijakan fasilitasi industri kreatif yang mempertemukan pendekatan produksi dan konsumsi.
2. Pemda DIY secara tertulis telah merancang beberapa kebijakan untuk mendorong provinsi DIY sebagai tempat produksi industri kreatif terutama untuk sektor kerajinan dan mode serta menyediakan atmosfer kota kreatif yang kondusif untuk menarik minat wisatawan, pekerja dan investor industri kreatif.
3. Secara umum, Implementasi kebijakan masih lemah. Perlu terobosan dengan komprehensif dan berkelanjutan di semua sub sektor industri kreatif dengan tetap mempertahankan sektor basis yang ada (*among tani-dagang layar; pertanian sebagai basis sektor jasa/dagang*).
4. Pemda DIY dengan UU 13/ 2012 ttg keistimewaan memiliki peluang mendorong industri kreatif terutama dari dukungan anggaran publik (Rp547 miliar, 2015) untuk sektor Kebudayaan (dengan proporsi 77%) dan Tata Ruang (dengan proporsi 21%).



Terimakasih
Thank you
Matur Nuwun

